

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA DAERAH DI BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN SIAK

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH :

SRI INDRIYANI
NPM. 165110696

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jl. Khairuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SRI INDRIYANI
NPM : 165110696
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan S1
PEMBIMBING : Drs. M. Nur, MM
Judul Skripsi : PENGARUH BELANJA DAERAH DI BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN SIAK.

MENYETUJUI :

PEMBIMBING

(Drs. M.Nur,MM)

MENGETAHUI :

DEKAN

KETUA JURUSAN

(Dr. Firdaus AR. SE, M.Si, AK)

(Drs. M.Nur,MM)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SRI INDRIYANI
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : BENGKALIS, 29 JULI 1998
NPM : 165110696
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH BELANJA DAERAH DI BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN, TINGKAT KEMISKINAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN SIAK

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil karya orang lain (**bukan plagiat/duplikasi**) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah. Demikian pernyataan ini tidak benar saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut atau dihukum sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pekanbaru, 01 September 2020

Yang Membuat Pernyataan


METERAI
TEMPEL
E46F4AHF6041:37967
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(SRI INDRIYANI)

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA DAERAH DI BIDANG KESEHATAN, BELANJA PENDIDIKAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN SIAK

OLEH:

SRI INDRIYANI
NPM. 165110696

(Dosen Pembimbing : Drs. M. Nur, MM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja kesehatan, belanja pendidikan, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Siak. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan hasil penelitian ini ialah metode analisis regresi berganda dimana metode tersebut digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai R^2 sebesar 0.830651. Hal ini tersebut 83% variabel bebas (belanja kesehatan, belanja pendidikan, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel terikat (Indeks Pembangunan Manusia). Sedangkan sisanya sebesar 17% dijelaskan oleh variabel bebas dan Uji T (Parsial) dapat diketahui bahwa variabel belanja kesehatan (X_1) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Siak, kemudian variabel belanja pendidikan (X_2) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Siak, sedangkan variabel tingkat kemiskinan (X_3) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Siak, selanjutnya variabel pertumbuhan ekonomi (X_4) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Siak. Sedangkan berdasarkan Uji F (Simultan) ke empat variabel bebas tersebut secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak.

Kata Kunci : Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL SPENDING IN THE HEALTH SECTOR, EDUCATION SECTOR, POVERTY LEVELS AND ECONOMIC GROWTH ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SIAK DISTRICT

BY :

SRI INDRIYANI

NPM. 165110696

(Consultant: Drs. M. Nur, MM)

This study aims to determine how much influence the health expenditure, education spending, poverty levels, and economic growth on the human development index (HDI) in Siak district. The data used in this study is secondary data. Data analysis method used in processing the result of this study is the multiple regression analysis method where the method is used to measure the effect of independent variables on the dependent. The results showed that the R^2 value was 0.830651. This is 83% of the independent variables (health expenditure, education expenditure, poverty level, and economic growth) already represent to explain the dependent variable (human development index). While the remaining 17% is explained by the independent variable and T test (partial) it can be seen that the health expenditure variabel (X1) has a positive and not significant effect on the human development index (Y) in Siak district, then the education expenditure variable (X2) has an influence positive and not significant to the human development index (Y) in Siak district, while the poverty level variable (X3) has a positive and not significant effect on the human development index (Y) in Siak district, furthermore the economic growth research variable (X4) has a positive and significant effect on the human development index in Siak district. While based on the F test (simultaneous) the four independent variables simultaneously have a significant effect on the human development index in the district of Siak.

Keywords: health spending, education spending, poverty rates and economic growth

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH BELANJA DAERAH DI BIDANG KESEHATAN, BELANJA PENDIDIKAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN SIAK” dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai salah satu syarat bagi setiap mahasiswa Universitas Islam Riau pada program studi ekonomi pembangunan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibina wanabiyina Muhammad SAW tak lupa keluarga dan sahabat mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua, Amin.

Ungkapan terimakasih yang tak terhitung penulis ucapkan kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayah dan Ibu, terimakasih untuk cinta, kasih sayang, serta dukungan baik moril maupun material. Terimakasih untuk doa dan harapan yang tak pernah putus dari kalian, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Di samping itu penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penulisan skripsi ini berlangsung, di antaranya:

1. Bapak Drs. Firdaus AR., S.E., M.Si., Ak Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

2. Bapak Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. M. Nur., MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Ibu Sinta Yulyanti, SE., M. Ec., Dev selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pengajaran selama dibangku perkuliahan beserta staff pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau terkhususnya pada Program Studi Ekonomi Pembangunan.
6. Badan Pusat Statistik dan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis selama penulisan berlangsung.
7. Terima kasih tiada tara kepada kedua Orang Tua (Ahmad Hambali selaku ayah kandung saya, Wan Salmah selaku ibu kandung saya dan abang kandung saya Taufik Hidayat A.Md) dan saya adalah anak terakhir dari dua bersaudara. Saya mengucapkan terimakasih yang selalu memberikan Support, motivasi, do'a, dukungan, nasihat, perhatian, cinta dan kasih sayang yang luar biasa kepada selaku penulis.
8. Terima kasih pula kepada keluarga besar Ekonomi Pembangunan 2016 yang selalu memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini berlangsung.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang merupakan keluarga kedua saya, Nadya Zillia, Fitria Isramelda, Lenny Novicara, Rahmawati, Kak Yuli, Kak Yara, Bang Khairul, Bang Wili, Muhammad Ibnu,

Sri Nahda, Hijriatuzzahara, Wan Febri yang telah memberikan support dan doa kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada teman-teman organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau terkhususnya HIMEP FE UIR yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih juga buat senior dan junior yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah mensupport penulis dalam menyusun skripsi ini.
12. Kepada semua pihak dan teman-teman yang belum tersebut namanya, terima kasih telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap adanya kritikan dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan pada masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama kepada rekan-rekan yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

Pekanbaru, 16 Agustus 2020

Penulis

SRI INDRIYANI

DAFTAR ISI

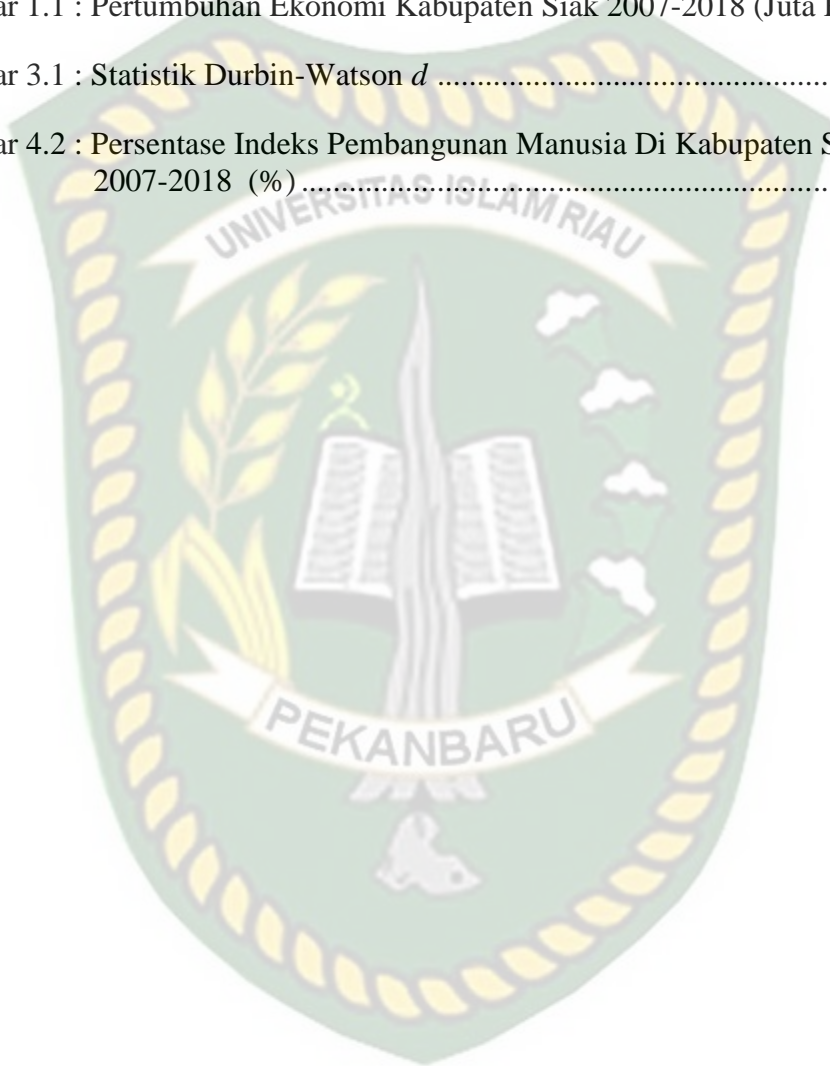
	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Tinjauan Teoritis	11
A. Konsep Pembangunan Manusia	11
B. Indeks Pembangunan Manusia	12
C. Dimensi Indeks Pembangunan Manusia	15
D. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia	17
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah	19
2.1.3 Belanja Daerah Bidang Kesehatan	24
2.1.4 Belanja Daerah Bidang Pendidikan	25

2.1.5 Kemiskinan	27
A. Penyebab indikator kemiskinan	29
B. Macam-Macam Kemiskinan	30
C. Kebijakan Mengurangi Kemiskinan.....	30
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi	31
A. Teori Pertumbuhan Ekonomi	31
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	33
C. Teori Pertumbuhan Neo Klasik.....	34
D. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern	35
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Hipotesa	37
BAB III : METODE PENELITIAN	38
3.1 Lokasi Penelitian	38
3.2 Variabel Penelitian.....	38
3.3 Jenis Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Teknik Analisis Data	43
BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	44
4.1 Profil Kabupaten Siak.....	44
4.2 Luas Dan Batas Wilayah	44
4.3 Kondisi Demografi Kabupaten Siak.....	45
4.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	47
4.5 Gambaran Pendidikan Kabupaten Siak	48

4.6 Gambaran Kesehatan Kabupaten Siak.....	50
4.7 Gambaran Kemiskinan Kabupaten Siak.....	51
4.8 Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak	52
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Pengaruh Belanja Daerah Di Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Tingkat Kemiskinan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangua Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018.....	54
5.1.1 Belanja Daerah Di Bidang Kesehatan	54
5.1.2 Belanja Daerah Di Bidang Pendidikan.....	55
5.1.3 Tingkat Kemiskinan	57
5.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	58
5.2 Pengaruh Belanja Daerah Di Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018.....	59
5.2.1 Koefisien Regresi	59
5.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	61
5.2.3 Uji T (Uji Parsial).....	62
5.2.4 Uji F.....	63
5.2.5 Uji Asumsi Klasik	63
5.3 Pembahasan	67
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	71
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak 2007-2018 (Juta Rupiah)	7
Gambar 3.1 : Statistik Durbin-Watson d	43
Gambar 4.2 : Persentase Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018 (%).....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan yang secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup suatu negara untuk mencapai tujuan ekonomi yang baik. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terlaksananya pembangunan di daerah tercemin dari terwujudnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan di setuju oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut sebagai peraturan daerah. Seharusnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di pergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja daerah yang secara efektif dapat berperan dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Badrudin, 2012).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur

dimensi pokok dari pembangunan manusia meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan yang merupakan sasaran pembangunan. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan unsur pembangunan yang sangat penting.

Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dibutuhkan sarana dan prasarana. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi disektor pendidikan dan kesehatan. Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar disuatu wilayah. Untuk mendukung aspek pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan sebagai anggaran. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan aspek pendidikan dan kesehatan melalui pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan (Muliza, 2014).

Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang pengembangannya indeks pembangunan manusia yang cukup pesat. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2018 mencapai angka di atas rata-rata di tingkat nasional. Kabupaten Siak menduduki peringkat yang ke 100

dari Provinsi dan Kabupaten. Bahkan pada tahun 2018 IPM Kabupaten Siak tercatat sebesar 73,73% dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 73,18%. Berikut angka indeks pembangunan manusia Kabupaten Siak dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.1 : Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018 (%)

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia(%)
1	2007	75.15
2	2008	75.64
3	2009	76.05
4	2010	69.78
5	2011	70.20
6	2012	70.45
7	2013	70.84
8	2014	71.45
9	2015	72.17
10	2016	72.70
11	2017	73.18
12	2018	73.73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2020

Berdasarkan pada tabel 1.1 tahun 2009 IPM Kabupaten Siak sebesar 76.05% dan pada tahun 2010 hingga 2018 IPM mengalami peningkatan sebesar 69.78-73.73%. IPM digunakan untuk melakukan peningkatan terhadap kinerja pembangunan suatu wilayah. Untuk membedakan tingkat IPM berdasarkan dari 3 klarifikasi yaitu: 1) *Low* (IPM kurang dari 50), 2) *lower –medium* (IPM antara 50 dan 65.99), 3) *Upper-Medium* (IPM antara 66 dan 79.99) dan 4) *high* (IPM 80 ke atas). Maka dapat disimpulkan di Kabupaten Siak selama periode 2009-2018 tergolong dalam tingkatan *Upper-Medium* atau menengah-atas (66 dan 79,99).

Pemerintah harus memperbaiki kualitas penduduk untuk mencapai kesejahteraan melalui sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Dengan melalui pendidikan manusia untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan meningkatkan kreativitas. Pendidikan ini juga merupakan jalan untuk kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan pendidikan akan menjadi masalah seperti angka putus sekolah yang menjadi beban bagi pemerintah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan.

Pembangunan manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pembangunan, karena manusia merupakan modal utama dalam pembangunan suatu daerah. Dengan adanya kebijakan alokasi APBD sepenuhnya yang dilakukan dengan pemerintah daerah dengan berlakunya desentralisasi fiskal yaitu: (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut melaksanakan dalam proses pembangunan. Kebijakan alokasi APBD sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berlakunya desentralisasi fiskal, hal ini juga bertujuan supaya pemerintah daerah dapat membangun daerahnya masing-masing dengan secara optimal.

Pemerintah juga memerlukan anggaran untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan untuk membangun pembangunan yang mendasar disuatu wilayah. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengimplementasi pendidikan dan kesehatan melalui pengeluaran pemerintah. Dengan itu juga pemerintah melakukan perencanaan anggaran yang di alokasikan untuk bidang

yang sudah direncanakan. Pemerintah berharap pada bidang yang telah direncanakan yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan juga dapat meningkatkan IPM yang ada di Kabupaten Siak. Untuk mengetahui perkembangan realisasi belanja daerah pada bidang kesehatan dan pendidikan dapat dilihat dibawah.

Tabel 1.2 : Realisasi Belanja Daerah Bidang Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten Siak Tahun 2009-2018 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Bidang Kesehatan	Bidang Pendidikan
1	2007	61.476.143.834,00	287.126.161.203,00
2	2008	51.329.022.249,00	239.248.416.751,00
3	2009	56.061.530.686,00	342.368.547.414,00
4	2010	57.902.829.071,00	333.992.194.764,00
5	2011	64.087.877.419,00	333.728.597.043,00
6	2012	98.932.821.725,00	397.330.748.543,00
7	2013	126.474.136.741,00	438.411.662.240,00
8	2014	118.680.243.592,00	498.174.473.310,00
9	2015	153.826.487.439,71	592.549.305.596,00
10	2016	130.072.454.120,00	456.866.869.139,00
11	2017	137.034.563.375,25	483.776.963.452,00
12	2018	162.810.914.441,73	504.077.924.048,00

Sumber : BPK RI Provinsi Riau, 2020

Tabel 1.2 memperlihatkan perkembangan realisasi belanja daerah bidang kesehatan dan bidang pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2007-2018. Perkembangan realisasi belanja bidang kesehatan Tahun 2007 sebesar Rp.61.476.143.834,00,- dan bidang pendidikan sebesar Rp.287.126.161.203,00,- Tahun 2010 total realisasi belanja bidang kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp.57.902.829.071,00,- dan bidang pendidikan mengalami penurunan sebesar

Rp.333.992.194.764,00,- Pada tahun 2016 bidang kesehatan mengalami penurunan realisasi belanja sebesar Rp.130.072.454.120,00,- dan pada Tahun 2018 bidang pendidikan mengalami peningkatan realisasi belanja sebesar Rp. 504.077.924.048,00,- dan pada Tahun 2017 bidang kesehatan mengalami peningkatan realisasi belanja terbesar sebesar Rp.137.034.563.375,25,- sedangkan pada Tahun 2016 bidang pendidikan mengalami penurunan terbesar sebesar Rp.456.866.869.139,00,- dan pada Tahun 2018 bidang kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp.162.810.914.441,73,-

Selain dari sisi belanja daerah faktor lain yang dianggap penting dalam peningkatan IPM ialah dari segi tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Kemiskinan merupakan aspek yang menggambarkan kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat kemiskinan di setiap negara maupun daerah. Jumlah penduduk miskin akan berpengaruh terhadap pemberdayaan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada indeks pembangunan manusia (IPM).

Pada tahun 2008 tingkat kemiskinan di Kabupaten Siak masih relatif tinggi dibandingkan pada tahun lalu. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Siak pada tahun 2008 sebesar 7,09% sedangkan di tahun 2018 sebesar 5,44%. Kondisi IPM kabupaten siak selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi.

Dengan itu juga tak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan program peningkatan SDM secara berkesinambungan dengan alokasi anggaran yang memadai. Disisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak, menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun 2007-2018 mengalami fluktuasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak Tahun 2007-2018 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2020

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa dari tabel diatas bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2007-2018 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar Rp.30.806.500-, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.52.615.037.

Dari uraian diatas maka penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja di bidang kesehatan, bidang pendidikan, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Siak.

Oleh karena itu penulis memilih untuk mengangkat judul “PENGARUH BELANJA DAERAH DI BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2007-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat di simpulkan dalam masalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Daerah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018?
2. Apakah Tingkat Tingkat Kemiskinan Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Apakah Belanja Daerah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018
2. Untuk Mengetahui Apakah Tingkat Kemiskinan Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018.

3. Untuk Mengetahui Apakah Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti dan pembaca, untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh belanja daerah bidang kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia tahun 2007-2018.
2. Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Khususnya untuk mahasiswa Jurusan Ilmu Studi Pembangunan (IESP) serta peneliti lainnya yang melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dalam peningkatan IPM di Kabupaten Siak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman, maka penulis menjadi beberapa bab dari masing-masing bab dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi dan mendukung dalam penulisan serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah karena di perlukan untuk kebenaran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, dan jenis-jenis sumber data, pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang gambaran umum tentang Kabupaten Siak, jumlah kabupaten dan kecamatan, pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

BAB V : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh belanja daerah, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM Kabupaten Siak.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran bagi penulis sebagai sumbangan pemikiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Manusia adalah sebagai alat untuk membentuk modal bagi negara yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan menciptakan lingkungan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, hidup sehat dan menjalankan kehidupan produktif (*UNDP, Human Development Report, 1990*). Pembangunan nasional merupakan secara keseluruhan yang melakukan pembangunan nasional manusia yang merupakan bagian terpenting untuk mendapatkan perhatian. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besarnya permasalahan yang ada di negara yang dapat di atasi oleh pemerintah. Permasalahan ini juga dapat dilihat seperti kemiskinan, gizi buruk dan buta huruf.

Peningkatan kemampuan dasar manusia adalah salah satu pembentukan modal manusia bagi bangsa. Dengan adanya modal seperti mempunyai keahlian, pendidikan, dan berpengalaman untuk menentukan pembangunan ekonomi suatu negara. Modal manusia sebagai alat dorong untuk pertumbuhan ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kesehatan adalah modal yang harus dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan potensinya. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas terdapat ada beberapa yang harus diperbaiki dari aspek-aspek tersebut (BPS,2017).

Menurut *Human Development Report* (HDR) 1995 bahwa konsep pembangunan manusia harus diperhatikan dari aspek tersebut yaitu:

1. Produktifitas, dimana masyarakat meningkatkan produktifitas dan partisipasi dalam mencari lapangan pekerjaan.
2. Pemerataan, akses masyarakat dapat memperoleh kesempatan adil. Semua hambatan yang memiliki peluang ekonomi maupun politik harus dihapuskan supaya masyarakat dapat berpartisipasi untuk mendapatkan manfaat dari kesempatan ini dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kestinambungan, permodalan fisik, manusia dan lingkungan hidup yang di pastikan untuk generasi yang akan datang.
4. Pemberdayaan, pembangunan dapat dilakukan oleh masyarakat yang harus berpartisipasi penuh untuk mengambil keputusan yang sudah ditentukan untuk mempengaruhi kehidupan mereka dan mengambil manfaat dari proses pembangunan

A. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 pengembangan Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Amartya Sen seorang pemenang nobel India dan Mahnin ul Haq seorang ekoNom Pakistan. Yang dibantu oleh Gustav Ranis dari Unversitas Yale dan Lord Meghan Desai dari *London School of Economis*. Sejak adanya indeks yang dikembangkan ini juga telah dipakai oleh program PBB. Keberhasilan pembangunan yang diukur oleh adanya indikator yang menunjang untuk keberhasilan pembangunan yang disebut juga Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks pembangunan manusia yang baru masih berdasarkan standar hidup, pendidikan, dan kesehatan. Indeks pembangunan manusia yang baru ini memiliki delapan perubahan yaitu:

1. Pendapatan nasional bruto (GNI) perkapita menggantikan produk domestik bruto (GDP) perkapita. Perubahan ini merupakan perbaikan yang tidak ambigu. GNI mencerminkan apa yang dilakukan oleh warga negara dengan pendapatan yang diperoleh.
2. Indeks pendidikan di ubah menjadi dua komponen yaitu, rata-rata pencapaian pendidikan yang aktual seluruh penduduk dan pencapaian pendidikan yang diharapkan dari anak di masa kini. Ukuran pencapaian pendidikan aktual rata-rata lama bersekolah sebagai indikator yang merupakan perbaikan yang tidak ambigu.
3. Pencapaian pendidikan yang diharapkan adalah komponen baru yang tidak ambigu. Peningkatan pencapaian pendidikan yang berlangsung cepat di beberapa negara sehingga ada risiko harapan yang rendah juga dapat melemahkan semangat. Tingkat harapan hidup yang masih digunakan sebagai indikator kesehatan yang merupakan proyeksi yang didasarkan atas kondisi yang berlaku.
4. Dua komponen sebelum dipakai sebagai indikator dalam indeks pendidikan, yaitu angka melek huruf dan partisipasi sekolah yang sudah tidak digunakan lagi.
5. Patokan tujuan atas nilai maksimum di setiap dimensi di naikkan pada nilai maksimum dibandingkan dengan angka sebelumnya.

6. Patokan tujuan bagi tingkat pendapatan telah dikurangi yang didasarkan pada estimasi pencapaian zimbabwe pada tahun 2007 dengan menafsirkan tidak keliru, yang mewakili tingkat pendapatan rendah.
7. Perbedaan kecil lainnya adalah ketimpangan yang menggunakan logaritma yang mencerminkan manfaat pendapatan marginal, HDI yang baru sekarang memakai log natural.
8. Perubahan yang berdampak adalah perhitungan HDI dengan rata-rata geometri.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali yang memperkenalkan oleh United Nation Development Program (UNDP) tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pembangunan manusia yang disebut Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu IPM mulai menerbitkan dalam *Human Development Report* setiap tahunnya.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain pembangunan.

Manfaat penting dari IPM antara lain lain sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.

Berdasarkan besaran Indeks Pembangunan Manusia, negara-negara di dunia dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah, jika memiliki nilai 0 sampai 0,50.
2. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah jika memiliki nilai 0,50 sampai 0,79.
3. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan yang tinggi jika memiliki nilai 0,80 sampai 1.

B. Dimensi Indeks Pembangunan Manusia

Dimensi IPM secara ketiga dimensi dijelaskan sebagai berikut (BPS, 2017):

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur panjang dan hidup sehat merupakan indikator yang memiliki dimensi umur harapan hidup sehat saat lahir dalam perhitungan IPM. Umur panjang yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana maupun prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Dengan adanya kesehatan akan lebih berarti bagi masyarakat dengan adanya fasilitas yang murah dan terjangkau yang sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan juga pembinaan sumber daya manusia (SDM). Undang-undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pasal 28 H ayat 1

menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Pasal 3 Ayat 3 ditegaskan bahwa “ Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”.

2. Indeks Pengetahuan

Indeks pengetahuan mempunyai dimensi yang terdiri dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Cakupan alam menghitung harapan lama sekolah adalah oleh anak pada umur 7 tahun. Sebagai lamanya sekolah yang diharapkan yang akan dirasakan sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang selesai dalam pendidikan formal. Salah satu tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mendapatkan pengajaran, pendidikan dan ilmu pengetahuan yang juga merupakan hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang 1945 pasal 28C, pasal 28E dan pasal 31.

Pendidikan memegang peranan penting sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Untuk mengupayakan pemerataan kesempatan yang memperoleh pendidikan yang layak atau bermutu. Dengan itu juga pemerintahan yang ada negara akan melakukan adanya program belajar untuk pendidikan dasar. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang minima bagi warga negara Indonesia. Dimana

dalam UUD 1945 mengatakan, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

3. Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari tahun ke tahun, pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Indonesia terus mengalami peningkatan selama tahun ke tahun. Sedangkan BPS dalam menggunakan standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat UNDP mengukur standar hidup layak yang menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang sudah disesuaikan.

C. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum perhitungan IPM, setiap komponen harus dihitung indeksinya.

1. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

I : Indeks Komponen

AHH : Angka Harapan Hidup

AHH_{min} : Angka Harapan Hidup Terendah

AHH_{maks} : Angka Harapan Hidup Tertinggi

2. Dimensi Pendidikan

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

Keterangan :

I : Indeks Komponen

HLS : Harapan Lama Sekolah

HLS_{\min} : Harapan Lama Sekolah Terendah

HLS_{\max} : Harapan Lama Sekolah Tertinggi

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

Keterangan :

I : Indeks Komponen

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

RLS_{\min} : Rata-Rata Lama Sekolah Terendah

RLS_{\max} : Rata-Rata Lama Sekolah Tertinggi

3. Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}{\ln(\text{pendapatan}_{\max}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})} \dots (3)$$

Keterangan :

I : Indeks Komponen

\ln : Indeks Komponen

$\text{Pengeluaran}_{\min}$: Pengeluaran Terendah

Pengeluaran_{maks} : Pengeluaran Tertinggi

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup (tahun)	85	25	Standar UNDP
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Sekolah (tahun)	15	0	Standar BPS
Daya Beli (tahun)	737.720 ^a	300.000(1996)	Pengeluaran Pekapita Rill Disesuaikan.

Sumber : Badan Pusat Statistik Siak, 2019

Indeks pembangunan manusia merupakan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumus adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = (X(i) - X(i)\text{min}) / (X(i)\text{maks} - X(i)\text{min})$$

Dimana :

X (i) : Indikator ke-i (i=1,2,3)

X (i) maks : Nilai maksimum X (i)

X (i) min : Nilai minimum X (i)

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah semua pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Boediono, 1993).

Pengeluaran pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang

dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan.

Pengeluaran pemerintah (*Government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000) yaitu tindakan pemerintah untuk mengatur perekonomian yang ada di negara dengan cara menentukan besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang setiap tahunnya, yang sudah tertera di dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah regional. Dalam APBN pengeluaran belanja secara garis besar dikelompokkan ke dua golongan yaitu:

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin yang dimaksudkan sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, yang terdiri dari (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) pembayaran bunga utang, (iv) subsidi, dan (v) pengeluaran rutin lainnya.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik. Menurut Dumairy (1999) dalam skripsi Brilian (2016) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu:

1. Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal.
2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil ekonomi secara adil.

3. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian apabila berada dalam keadaan disequilibrium.
4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Klasifikasi belanja publik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 27 menetapkan klasifikasi belanja sebagai berikut :

1. Klafikasi Belanja Daerah menurut oganisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.
2. Klasifikasi belanja menurut organisasi di sesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
3. Klasifikasi Menurut Fungsi Terdiri Dari :
 - a. Klafikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial pemerintah daerah.
 - b. Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negaa untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam pengelola keuangan negara.

Sedangkan Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci dari klasifikasi belanja daerah bedasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib. Menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
 - a. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan
 1. Pertanian
 2. Kehutanan
 3. Energi dan Sumber Daya Mineral
 4. Pariwisata
 5. Kelautan dan Perikanan

Klasifikasi belanja publik dapat dikategorikan berdasarkan sebagai macam kriteria, salah satu diuraikan dalam *Government Finance Statistics Manual* (1986) sebagai berikut:

1. Belanja Jasa Publik Umum

Belanja-belanja yang termasuk dalam kategori antara lain adalah belanja operasi untuk organisasi eksekutif dan legislatif, belanja untuk jasa-jasa umum, belanja riset dasar, belanja administrasi unit pemerintah daerah.

2. Belanja Pertahanan

Belanja-belanja ini antara lain adalah belanja pertahanan militer dan sipil, bantuan militer untuk asing, riset pertahanan dan sebagainya.

3. Belanja Perlindungan Umum

Belanja kategori ini dibedakan dengan belanja pertahanan, diantaranya adalah belanja jasa kepolisian, jasa pemadam kebakaran, jasa rumah tahanan dari riset untuk perlindungan publik.

4. Belanja Urusan Ekonomi

Belanja yang termasuk dalam kategori diantaranya belanja urusan ketenagakerjaan, belanja komersial, belanja energy dan bahan bakar dan belanja perindustrian.

5. Belanja Perlindungan Lingkungan

Belanja yang termasuk diantaranya adalah belanja pengolahan limbah dan polusi, serta tata kota.

6. Belanja Perumahan dan *Public Utilities*

Belanja kategori di antaranya adalah pengembangan perumahan dan pemukiman, sistem penyediaan air bersih, belanja penerangan jalan, dan pekerjaan umum lainnya.

7. Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan diantaranya adalah perlengkapan dan peralatan kesehatan, jasa kepada pasien, jasa rumah sakit umum.

8. Belanja Rekreasi, Budaya dan Agama

Belanja ini antara lain adalah belanja jasa olahraga dan rekreasi, belanja jasa kebudayaan, jasa penyiaran, jasa urusan keagamaan.

9. Belanja Pendidikan

Belanja pendidikan diantara lainnya adalah belanja pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, termasuk belanja pendukung pendidikan lainnya.

10. Belanja Perlindungan Sosial

Belanja perlindungan sosial diantara lainnya adalah belanja perlindungan terhadap manusia usia lanjut, belanja perlindungan anak dan keluarga, belanja untuk mengatasi pengangguran dan belanja sosial lainnya.

Menurut Halim (2002) belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagai lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan beberapa bidang penting yang akan dibiayai oleh pemerintah.

2.1.3 Belanja Daerah Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia, tanpa adanya kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas untuk Negara. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi yang sebagai input produksi agregat, input maupun output sebagai peran yang menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pembangunan manusia (Todaro, 2011:85).

Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

Provinsi, Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang anggaran kesehatan adalah UU No 36 Tahun 2009 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa besar anggaran akan dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan 10% dari APBD di luar gaji.

Pelayana publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik harus diberikan kepada masyarakat terdapat 2 diklafikasi yaitu pelayanan kebutuhan dan pelayanan kebutuhan pokok. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar oleh masyarakat. Dengan adanya kesehatan masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Dengan perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya yang merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan merupakan faktor utama untuk kesejahteraan masyarakat yang hendak mewujudkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah juga member pelayanan kesehatan secara adil, merata dan berkualitas. Dengan itu juga pemerintah mengalokasikan belanja untuk meningkatkan pembangunan melalui peningkatan kesehatan.

2.1.4 Belanja Daerah Bidang Pendidikan

Menurut Sukirno (2004) pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Dengan itu juga pendidikan dapat

dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh semua manusia dikemudian hari. Pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dampaknya langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 1 ayat ke (3) Anggaran belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, anggaran pendidikan yang dikelola dan sudah dialokasi secara tepat yang mampu untuk meningkatkan tingkat melek huruf dan tingkat lama sekolah.

Belanja pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebut bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bidang pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan menunjukkan bahwa perhatian pada usaha komponen utama yang terdapat didalamnya adalah kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui perbaikan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat dilihat sebagai

komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan, sehingga pemerintah berperan sebagai untuk mengalokasikan belanja untuk peningkatan pembangunan melalui peningkatan peningkatan (Todaro,2016).

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Menurut (Kuncoro,2002) Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyak pengangguran.

Menurut (Supriatna 1997:90) kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk yang dikatakan miskin bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidup. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang akan menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Lebih lanjut Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin yaitu: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak

diantaranya tidak memiliki fasilitas yang lengkap, 5) Diantaranya mereka tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Menurut (*World Bank*, 2004) salah satu penyebab kemiskinan ialah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan sandang. Disamping itu juga kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya dapat dikategorikan miskin, tidak memiliki pekerjaan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya (Adisasmita, 2005).

A. Penyebab Indikator Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang dapat menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada proses pemenuhan kebutuhan hidup untuk hidup layak dan sejahtera (menurut Sharp, 1996 dalam kuncoro, 2006:120).

Ukuran kemiskinan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Indikator kemiskinan atau garis kemiskinan di Indonesia bermacam-macam. BPS menggunakan batas kemiskinan

dengan indikator besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minum makanan dan bukan makanan, (BPS, 2019)

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari.
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

B. Macam-Macam Kemiskinan

Menurut Arsyad Lincoln (1997) macam-macam kemiskinan tersebut antara lain:

1. Kemiskinan absolut, seseorang yang termasuk golongan miskin absolut apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mencapai keberlangsungan hidup, seseorang tersebut dapat disebut penduduk miskin.
2. Kemiskinan relatif, seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitar.

C. Kebijakan Mengurangi Kemiskinan

Menurut Arsyad (2004:242), ada beberapa kebijakan dalam mengurangi kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Perbaikan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok membutuhkan sumber investasi modal yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Tanpa kemajuan dan perbaikan akses golongan miskin terhadap pelayanan-pelayanan pokok, efektif dari pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan bisa terganggu. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengakomodasi penduduk yang sedang meningkat terutama kelompok yang berpendapatan rendah, seperti penyediaan air, program perbaikan desa, dan penyediaan perumahan yang murah bagi kelompok miskin.

2. Pembangunan Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Aspek dari pembangunan pertanian sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskninan terutama di pedesaan. Kontribusi untuk peningkatan pendapatan pedesaan dan mengurangi kemiskinan yang dihasilkan dari adanya revolusi teknologi padi, pembangunan irigasi. Kontribusi dari pemerintah adalah program pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman beras. Contohnya petani luar jawa dibantu untuk

menanam karet dan sebagainya supaya pembangunan diluar jawa berperan untuk mengurangi kemiskinan di jawa melalui pembangunan pertanian di daerah transmigrasi.

3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat berperan besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena LSM ini bisa menjangkau golongan miskin secara efektif ketimbang program-program pemerintah. Dengan adanya LSM ini dapat meringankan biaya finansial dan mengimplementasikan program padat karya untuk mengurangi kemiskinan.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2012:29) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic product*) atau naiknya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu Negara dalam satu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di Negara-negara lain yang ada di suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Ada beberapa perkembangan fisik yang terjadi di suatu negara untuk menambah produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu.

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi menurut (Todaro dan Smith, 2006):

1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fiskal dan sumber daya manusia. Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang ditabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dimasa akan datang. Investasi disertai dengan investasi infrastruktur yakni berupa jalan, listrik, air bersih demi menunjang aktivitas ekonomi produktif.
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.
3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama.

Ada 2 klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu:

- 1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- 2) Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja atau hemat modal, yaitu tingkat output yang lebih tinggi bias dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut Adam Smith sebagai ahli ekonomi klasik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian menurut David Ricardo, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik-menarik antar dua kekuatan yaitu “*The Law of Deminishing Return*” dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Mill, bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat dan kepercayaan. Dari beberapa pendapat Ahli Ekonomi Klasik dapat disimpulkan:

- 2) Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah dan tingkat teknologi yang dicapai.
- 3) Kenaikan upah yang menyebabkan kenaikan penduduk.
- 4) Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal. Bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai “*stationary state*”, yaitu suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali.
- 5) *The law of deminishing return* berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan penambahan produk yang akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah (Jhingan, 2014:88).

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Pada pertengahan tahun 1950-an teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik mulai berkembang yang merupakan suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan para ahli ekonomi klasik. Perintisnya adalah Solow, kemudian dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan JE Meade. Para ahli tersebut berpendapat yaitu:

1. Adanya akumulasi capital yang merupakan faktor penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi.
2. Perkembangan merupakan proses yang gradual.
- 3) Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- 4) Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan.
- 5) Aspek internasional yang merupakan faktor bagi perkembangan.

Menurut Solow, yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya penambahan modal dan tenaga kerja. Namun yang terpenting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja (Jhingan, 2014:265)

D. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow, pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur social, nilai sosial dan stuktur kegiatan ekonominya dan dalam bukunya yaitu "*The Stage of Economic*" (1960). Rostow mengemukakan tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya kedalam lima tahap, yaitu:

1. Masyarakat tradisional
2. Persyaratan tinggal landas
3. Tinggal landas
4. Menuju kematangan
5. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi (Jhingan, 2014:142).

Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara atau daerah yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kenaikan kapasitas itu ditentukan adanya kemajuan teknologi, institusional dan ideologis yang diperlukannya. Ada 3 komponen yang perlu kita ketahui yaitu 1) Kenaikan output secara berkeselimbangan adalah perwujudan yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan untuk menyediakan berbagai jenis barang yang merupakan kematangan ekonomi disuatu negara yang bersangkutan. 2) Perkembangan teknologi merupakan dasar bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan yang merupakan suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup dengan adanya perkembangan atau kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain. 3) Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung didalam teknologi, maka perlu diadakan penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi.

Menurut pendapat Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, misalnya kenaikan output

yang disebabkan oleh penambahan faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama (Arsyad, 2010:96).

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Novita dewi, (2017)	Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau	Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Riau.
2	Meliyana Astri, Sri Indah Nikensari, Harya Kuncara (2013)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.	Variabel pengeluaran di sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel pengeluaran di sektor kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
3	Muliza, T. Zulham, Chenny Seftarita, (2017)	Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten /Kota Di Provinsi Aceh	Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2.3 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori dapat ditarik hipotesa sebagai berikut:

1. Belanja Daerah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Berpengaruh Positif Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018.
2. Kemiskinan Berpengaruh Positif Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018.
3. Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak, yang dikarenakan untuk melihat perkembangan belanja daerah. Bahwa begitu pentingnya untuk mengetahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai gambaran keberhasilan pembangunan manusia di bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

3.2 Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat Y (Variabel Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel terikat yang digunakan yaitu indeks pembangunan manusia (Y).

2. Variabel Bebas X (Variabel Independent)

Variabel bebas merupakan variabel yang dipengaruhi perubahan akan timbulnya variabel dependen. Variabel independent dalam penelitian ini yaitu :

- a. X_1 : Belanja Daerah Bidang Kesehatan
- b. X_2 : Belanja Daerah Bidang Pendidikan
- c. X_3 : Tingkat Kemiskinan
- d. X_4 : Pertumbuhan Ekonomi

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang berbentuk time series selama tahun 2007-2018 yang diperoleh data instansi-instansi lain pemerintah terkait:

1. BPS Kabupaten Siak, data yang diperoleh adalah data Indeks Pembangunan Manusia, data Kemiskinan dan data Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siak tahun 2007-2018.
2. BPK Provinsi Riau, data yang diperoleh adalah data realisasi belanja daerah dibidang Kesehatan dan dibidang Pendidikan di Kabupaten Siak tahun 2007-2018.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Karena dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi atau arsip yang ada di kantor atau instansi yang berhubungan dengan penelitian. Seperti lembaga instansi dalam penelitian ini meliputi Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Siak), dan BPK Provinsi Riau.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu regresi berganda. Dari analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (*Independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Menurut Noor (2014), analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara

kuantitatif dari perubahan nilai X terhadap perubahan nilai Y. Jadi model regresi pada penelitian Widorjono, 2018 adalah :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (%)

b_0, b_1, b_2, b_3, b_4 = Bilangan Konstanta

X_1 = Belanja Daerah Bidang Kesehatan (RP)

X_2 = Belanja Daerah Bidang Pendidikan (RP)

X_3 = Tingkat Kemiskinan (%)

X_4 = Pertumbuhan Ekonomi (Juta Rupiah)

e = Error Term

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat menggunakan alat analisis eviews, dimana akan melihat tingkat signifikan. Adapun uji statistik yang akan dilakukan untuk mengetahui variabel independent terhadap dependen yang berpengaruh dapat dilihat sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independent (Widarjono, 2013:69). Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1. Jika R^2 yang diperoleh mendekati 1, maka dari variabel independen terhadap variasi variabel dependen semakin besar. Sebaliknya

jika R^2 mendekati 0, maka variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil.

b. Uji T (Uji Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Prob. < 0.05 maka H_0 ditolak, artinya masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Prob. > 0.05 maka H_0 diterima, artinya masing-masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh terhadap salah satu variabel. Kriteria pengujian antara lain.

- 1) F prob. < 0.05 maka H_0 ditolak, artinya secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) F prob. > 0.05 maka H_0 diterima, artinya secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dependen.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui hasil estimasi regresi yang dilakukan atas asumsi klasik yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Widarjono (2013:49)

ada 2 metode untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak, antara lain sebagai berikut:

- a) Histogram Residual, ciri utamanya yaitu bentuk grafik distribusi normal ialah menyerupai lonceng, apabila tidak berbentuk lonceng maka model regresi tersebut mempunyai distribusi tidak normal.
- b) Uji Jarque-Bera, model regresi yang mempunyai distribusi normal nilai JB nya harus diatas nilai Chi Square.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel terikat dan variabelbebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam uji ini, yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

- a) Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal
 - b) Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal.
- 2) Heterokedastisitas

Heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas ini digunakan untuk metode white. Metode white mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan (Widajono, 2013:125). Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut heterokedastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai *Chi Square*(Obs*R-square) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai *chi square* $<$ nilai kritis, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
- b) Nilai *chi square* $>$ nilai kritis, maka terjadi heterokedastisitas

3) Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linear antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel dalam satu regresi disebut multikolinieritas. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dengan melakukan nilai VIF dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai VIF < 10 , maka tidak terkena multikolinieritas.
- b) Nilai VIF > 10 , maka terkena multikolinieritas.

4) Autokolerasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi linear ada kolerasi antara satu variabel gangguan dengan variabel lainnya. Jika terjadi kolerasi maka dinamakan ada masalah autokolerasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Autokolerasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Apabila D-W terletak antara -2 sampai $+2$ maka tidak ada autokolerasi.



Gambar 3.1 Statistik Durbin-Watson d

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Profil Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya Siak ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pada tahun 1945 awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II dengan menyatakan untuk bergabung di negara Republik Indonesia. Akhirnya wilayah Siak ini menjadi wilayah Kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 Kecamatan Siak berubah menjadi Kabupaten dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura.

4.2 Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Siak memiliki luas 8.556,09 km² atau 9,74% dari total luas wilayah di Provinsi Riau yang merupakan wilayah terluas ke-6 Kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di kota Siak Sri Indrapura. Secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Siak sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :Kabupaten Bengkalis.
- b. Sebelah Selatan :Kabupaten Pelalawan.
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar Dan Kota Pekanbaru.

Wilayah Kabupaten Siak secara administrasi terdiri 14 Kecamatan, 9 kelurahan dan 122 desa. Luas wilayahnya mencapai 8.275,18 km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Jumlah Kecamatan, Kelurahan di Kabupaten Siak 2018.

No	Kecamatan	Banyak Desa
1	Bunga Raya, Siak	10
2	Dayun, Siak	11
3	Kandis, Siak	11
4	Kerinci Kanan, Siak	12
5	Koto Gasip, Siak	11
6	Lubuk Dalam, Siak	7
7	Mempura, Siak	8
8	Minas, Siak	5
9	Pusako, Siak	7
10	Sabak Auh, Siak	8
11	Siak, Siak	8
12	Sungai Apit, Siak	15
13	Sungai Mandau, Siak	9
14	Tualang, Siak	9
TOTAL		131

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka, 2020

4.3 Kondisi Demografi Kabupaten Siak

Penduduk Kabupaten Siak tahun 2017 berjumlah 417.386 jiwa data tersebut registrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5.002 Jiwa. Dengan kepadatan penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2017 sebesar 48,78 Jiwa/Km².

Penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk laki-laki dan perempuan. Penduduk Kabupaten Siak jenis kelamin laki-laki berjumlah sebesar 216.006 Jiwa (51,67%) dan jenis kelamin perempuan berjumlah sebesar 201.380 Jiwa. Penduduk laki-laki dan perempuan menghasilkan *sex ratio* Kabupaten Siak sebesar 1,07% yang berarti 100 jumlah penduduk perempuan terdapat sekitar 107 jumlah penduduk laki-laki. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak dapat dilihat jumlah penduduk Kabupaten Siak .

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Menurut Kecamatan Tahun 2018 (Jiwa)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Minas	16856	16097
2	Sungai Mandau	4854	4578
3	Kandis	38399	36450
4	Siak	14381	13896
5	Kerinci Kanan	14817	13852
6	Tualang	67875	63589
7	Dayun	17254	15957
8	Lubuk Dalam	10923	10647
9	Koto Gasib	11776	11372
10	Mempura	9151	8776
11	Sungi Apit	15541	15301
12	Bunga Raya	13751	13147
13	Sabak Auh	6196	6090
14	Pusako	3211	2933
15	KABUPATEN SIAK	244985	232685

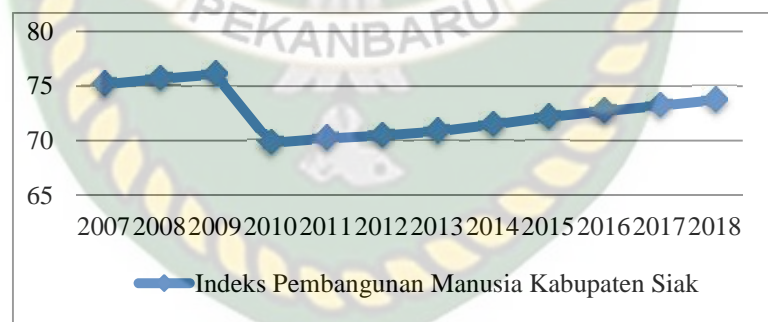
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2020

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kecamatan Tualang merupakan kecamatan dengan penduduk yang terbanyak. Dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Siak.

4.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak

Untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah yang salah satu untuk melakukan cara dalam mewujudkan dengan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan di suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia akan menunjukkan seberapa besar daerah yang telah mencapai target pembangunan manusia. Dengan melihat perkembangan IPM setiap tahunnya Kabupaten Siak perlahan meningkat. Angka IPM Kabupaten Siak pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 73,73% dari tahun sebelumnya tahun 2017 sebesar 73,18%. Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak.

Gambar 4.2 : Presentase Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018 (%).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat Kabupaten Siak tahun 2010 hingga 2018 IPM mengalami peningkatan sebesar 69,78-73,73%. IPM ini setiap tahunnya mengalami kenaikan signifikan. Untuk melihat kategori Indeks Pembangunan Manusia dikelompokkan ke dalam kategori yaitu:

1. 60 IPM < 70 tergolong kategori sedang

2. 70 IPM < 80 tergolong kategori tinggi
3. IPM 80 tergolong kategori sangat tinggi

Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Siak tergolong pada kategori tinggi. Dengan adanya kategori ini dapat diukur sejauhmana tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah.

4.5 Gambaran Pendidikan Kabupaten Siak

Tingkat kompetensi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri serta sikap yang inovatif. Dikatakan berhasil atau tidaknya suatu daerah akan dipengaruhi oleh SDM semakin tinggi kualitas pendidikan maka akan meningkat sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Seperti halnya di Kabupaten Siak tingkat partisipasi pendidikannya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah.

Tabel 4.4 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Siak, Tahun 2015-2017 (%).

Angka partisipasi sekolah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	96,88	99,15	100,00
13-15	97,97	92,33	92,77
16-18	86,69	84,16	77,33

Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2020

Maka dapat disimpulkan pada tabel diatas pada tahun 2015-2017 untuk usia 7-12 tahun tingkat partisipasi sekolah terus meningkat. Pada tahun 2017 untuk usia 13-15 tahun tingkat partisipasi sekolah terus meningkat. Sedangkan pada tahun 2017 untuk usia 16-18 tahun tingkat partisipasi sekolah menurun sebesar 77,33%, dibandingkan pada tahun sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 84,16%. Dengan itu juga tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari angka harapan lama

sekolah dan rata-rata sekolah yang berdasarkan dari metode lama dan baru, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 : Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Siak 2007-2018 (%).

Tahun	Harapan Lama Sekolah
2007	98,21
2008	98,21
2009	9,03
2010	8,6
2011	8,72
2012	8,77
2013	8,81
2014	9,05
2015	9,2
2016	9,21
2017	9,4
2018	9,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2020

Kemudian dapat dilihat dalam Tabel 4.5 jumlah angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Siak tahun 2009-2018.

Tabel 4.6: Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Siak 2007-2018 (%).

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah
2007	8,80
2008	8,80
2009	9,03
2010	8,60
2011	8,72
2012	8,77
2013	8,81
2014	9,05
2015	9,20
2016	9,21
2017	9,40
2018	9,64

Sumber : Badan Pusat Staistik Provinsi Riau, 2020

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Siak pada tahun 2017 mencapai 9,4% di harapkan anak pada usia tertentu sudah merasakan sekolah selama 12 Tahun. Hal ini juga termasuk dalam program pemerintah wajib belajar selama 12 Tahun. Dengan itu juga pemerintah berharap tidak hanya belajar selama 12 Tahun akan tetapi dapat melanjutkan belajar hingga jenjang perkuliahan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Siak tahun 2018 naik secara signifikan yaitu sebesar 9,64% ddi bandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 9,4%. Yang berarti bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Siak sudah bersekolah selama 12 Tahun.

4.6 Gambaran Kesehatan Kabupaten Siak

Kesehatan merupakan kebutuhan penting dan sekaligus investasi bagi pembangunan sumber daya manusia agar mereka dapat sehat dan hidup secara produktif. Kesehatan juga mempunyai peran penting dalam membangun Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan pelayanan dan kualitas kesehatan harus ditingkatkan pada perbaikan gizi, menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan dan juga upaya untuk jangka waktu usia. Dapat diperhatikan dalam permasalahan kesehatan dan perlu ditingkatkan dengan masyarakat hidup sehat dan bersih.

Dengan adanya sarana dan prasarana dilihat pada setiap tahunnya pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera bagi masyarakat. Di kabupaten siak tahun 2018 tercatat 2 rumah sakit, 10 rumah sakit bersalin, 33 poliklinik, 20 puskesmas, 96 puskesmas pembantu, 29 apotek, 44 dokter, 204 perawat, 220 bidan, 33 bidan, 15 ahli gizi, dengan ini juga sudah tersebar di setiap kecamatan.

4.7 Gambaran Tingkat Kemiskinan Kabupaten Siak

Kemiskinan merupakan satu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Permasalahan kemiskinan hampir terjadi diseluruh Negara yang sedang berkembang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dengan adanya permasalahan standar hidup layak, kesehatan dan pelayan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah sehingga berdampak kualitas sumber daya manusia yang rendah. Karena itu juga, pemerintah harus memperhatikan kondisi penduduk miskin yang ada di Kabupaten Siak. Pemerintah juga menekankan terhadap penduduk yang akan memantapkan kelompok menengah ke bawah melakukan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk sangat miskin dan miskin. Begitu juga dengan presentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Siak dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.7 : Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Siak 2007-2018 (%)

Tahun	Presentase Penduduk Miskin (%)
2007	6,01
2008	7,09
2009	5,71
2010	6,49
2011	5,29
2012	5,17
2013	5,54
2014	5,22
2015	5,67
2016	5,52
2017	5,8
2018	5,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2020

Presentase penduduk miskin Kabupaten Siak pada tahun 2018 sebesar 5,44%, tergolong lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan Kabupaten Siak juga berada di bawah presentase penduduk miskin Provinsi Riau sebesar 7,39%. Sejalan ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Siak terus menurun.

4.8 Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan naiknya produktifitas perekonomian sehingga tingkat pendapatan mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan perkapita merupakan cerminan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh itu juga, pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengacu pertumbuhan ekonomi Dengan itu juga dapat kita lihat perkembangan PDRB di kabupaten siak sebagai berikut:

Tabel 4.8 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018 (JutaRupiah)

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto
2007	30806500
2008	33152360
2009	35523610
2010	52420353
2011	52146929
2012	53226798
2013	51987673
2014	51485182
2015	51379296
2016	51557220
2017	52048831
2018	52615037

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2020

Maka dapat disimpulkan pada tabel 4.8 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak pada tahun 2014 sebesar 51,48 sedangkan, tahun 2018 sebesar 52,61 juta terus meningkat sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini juga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak yang menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Siak secara umum mengalami kemajuan di bandingkan dengan Provinsi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengaruh Belanja Daerah Di Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018.

5.1.1 Belanja Daerah Di Bidang Kesehatan

Belanja daerah menurut fungsi kesehatan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan *output* dari bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan dengan badan yang sehat manusia bisa melakukan segala aktifitasnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup pun manusia harus memiliki badan yang sehat agar produktifitas tidak terganggu. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah seharusnya memperhatikan salah satu hal yang mendukung terciptanya pembangunan manusia yaitu kesehatan, maka pemerintah dapat memperhatikan melalui alokasi anggaran pada bidang kesehatan. Meningkatnya anggaran kesehatan serta pengelolaan yang efektif maka realisasi belanja menurut fungsi kesehatan tentunya meningkat. Belanja kesehatan diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut fungsi kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, aspek kesehatan juga mempengaruhi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan. Adapun realisasi belanja daerah bidang kesehatan di Kabupaten Siak.

Tabel 5.1 : Realisasi Belanja Daerah Bidang Kesehatan di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018 (Dalam Rupiah).

Tahun	Bidang Kesehatan
2007	61.476.143.834
2008	51.329.022.249
2009	56.061.530.686
2010	57.902.829.071
2011	64.087.877.419
2012	98.932.821.725
2013	126.474.136.741
2014	118.680.243.592
2015	153.826.487.439
2016	130.072.454.120
2017	137.034.563.375
2018	162.810.914.441

Sumber: BPK RI Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja di bidang pendidikan di Kabupaten Siak mengalami fluktuasi. Realisasi belanja daerah yang tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 162.810.914.441 sedangkan realisasi paling rendah terdapat pada tahun 2008 yaitu sebesar 51.329.022.249.

5.1.2 Belanja Daerah Bidang Pendidikan

Belanja daerah menurut fungsi pendidikan merupakan bagian dari belanja daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan *output* dari bidang pendidikan. Meningkatnya anggaran pendidikan serta pengelolaan yang efektif. Maka realisasi belanja fungsi pendidikan akan meningkat, bahkan dapat berdampak positif untuk bidang pendidikan. Belanja pendidikan ini diukur dengan menggunakan realisasi APBD menurut fungsi pendidikan. Realisasi anggaran belanja bidang pendidikan di Kabupaten Siak selama tahun 2007-2018 tidak hanya dianggarkan dalam bentuk bantuan

pendidikan , bantuan bagi orang yang kurang mampu, namun realisasi pendidikan juga termasuk dalam fisik dan non fisik. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid,2012).

Realisasi belanja di bidang pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pendidikan yaitu dengan meningkatnya anak murid yang mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi. Adapun realisasi belanja daerah bidang pendidikan di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018, sebagai berikut:

Tabel 5.2 : Realisasi Belanja Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Siak Tahun 2007- 2018 (Dalam Rupiah).

Tahun	Bidang Pendidikan
2007	287.126.161.203
2008	239.248.416.751
2009	342.368.457.414
2010	333.992.194.764
2011	333.728.597.043
2012	397.330.748.543
2013	438.411.662.240
2014	498.174.472.310
2015	529.549.305.569
2016	456.866.869.139
2017	483.776.963.452
2018	504.077.924.048

Sumber: BPK RI Provinsi Riau,2020

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat dan disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah di bidang pendidikan Kabupaten Siak tahun 2007-2018 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat realisasi belanja pendidikan pada tahun 2007 yaitu sebesar 287.126.161.203 sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup pesat yaitu sebesar 504.077.924.048.

5.1.3 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dan IPM sangat berhubungan satu sama lain. Menurut Mahmudi penyebab kemiskinan ada tiga poros utama yaitu: rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya pendapatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Hubungan tersebut menjelaskan bahwa adanya penyebab kemiskinan yang merupakan bagian dari indikator IPM, mulai dari kesehatan dan pendidikan. Indikator tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan itu juga pemerintah harus menekankan perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan anak-anak yang masih bersekolah. Tingkat pendidikan membuat para pekerja mempunyai skill dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktifitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang. Adapun presentase penduduk miskin di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018 sebagai berikut:

Tabel 5.3 : Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018 (%)

Tahun	Presentase Penduduk Miskin
2007	6,01
2008	7,09
2009	5,71
2010	6,49
2011	5,29
2012	5,17
2013	5,54
2014	5,22
2015	5,67
2016	5,52
2017	5,8
2018	5,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2020

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dilihat dan disimpulkan bahwa presentase penduduk miskin di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat presentase penduduk miskin pada tahun 2008 yaitu sebesar 7,09%. Sedangkan presentase penduduk miskin pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,44%.

5.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pendapatan dan IPM mempunyai nilai kolerasi yang luas. Pertumbuhan pendapatan tidak secara langsung untuk meningkatkan IPM. Sedangkan untuk perbaikan bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang menyebabkan peningkatan IPM tidak selalu mengarah pada peningkatan pendapatan dan disebabkan sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam pembangunan manusia semakin baik pertumbuhan suatu wilayah maka akan semakin baik pula pembangunan manusia. Dengan itu juga, dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak sebagai berikut:

Tabel 5.4 : Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siak Tahun 2007-2018
(JutaRupiah)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2007	30806500
2008	33152360
2009	35523610
2010	52420353
2011	52146929
2012	53226798
2013	51987673
2014	51485182
2015	51379296
2016	51557220
2017	52048831
2018	52615037

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, 2020

Berdasarkan pada tabel 5.4 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 53,22 Juta Rupiah dan pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 51,37 Juta Rupiah.

5.2 Pengaruh Belanja Daerah di Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dengan menggunakan Program Eviews 10 diketahui pengaruh belanja daerah di Bidang Kesehatan (X1), Bidang Pendidikan (X2), Tingkat kemiskinan (X3) Pertumbuhan Ekonomi (X4) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Siak dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.5: Hasil Estimasi

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 08/17/20 Time: 21:57
Sample: 1 12
Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	189.2124	62.33729	3.035301	0.0190
LX1	1.883778	2.130402	0.884236	0.4059
LX2	1.962166	4.003673	0.490092	0.6391
X3	0.430962	0.821741	0.524450	0.6162
LX4	-12.40768	2.435490	-5.094532	0.0014
R-squared	0.830651	Mean dependent var		72.61167
Adjusted R-squared	0.733881	S.D. dependent var		2.178577
S.E. of regression	1.123857	Akaike info criterion		3.365747
Sum squared resid	8.841386	Schwarz criterion		3.567792
Log likelihood	-15.19448	Hannan-Quinn criter.		3.290943
F-statistic	8.583707	Durbin-Watson stat		1.239623
Prob(F-statistic)	0.007809			

Sumber: Hasil Oalahan Eviews,10

Dari hasil di atas, maka diketahui fungsi persamaan sebagai berikut:

$$Y = 189.2124 + 1.883778 X_1 + 1.962166 X_2 + 0.430962 X_3 - 12.40768 X_4 + e$$

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh belanja daerah bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi dari keempat variabel tersebut terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak. Berikut akan dijelaskan tentang pengaruh belanja daerah bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap indeks pembangunan manusia secara rinci.

5.2.1 Koefisien Regresi

Berdasarkan fungsi persamaan di atas, maka diketahui nilai koefisien dari setiap variabel. Berikut akan dijelaskan maksud dari nilai koefisien setiap variabel tersebut.

1. Konstanta b_0 sebesar 189.2124 artinya besarnya Indeks Pembangunan Manusia jika belanja kesehatan, bidang pendidikan, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sama dengan 0 adalah 189.2124.
2. Nilai koefisien b_1 Sebesar 1.883778. Hal tersebut berarti variabel belanja kesehatan (X_1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak (Y). Pengaruh positif tersebut artinya jika belanja kesehatan naik sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sebesar 1.883778 %.
3. Nilai koefisien b_2 sebesar 1.962166. Hal tersebut berarti variabel belanja pendidikan (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak (Y). Pengaruh positif tersebut

artinya jika belanja pendidikan naik sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sebesar 1.962166%.

4. Nilai koefisien b_3 sebesar 0.430962. Hal tersebut berarti variabel kemiskinan (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak (Y). Pengaruh positif tersebut artinya jika kemiskinan naik sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sebesar 0.430962%.
5. Nilai Koefisien b_4 sebesar -12.40768. Hal tersebut berarti variabel pertumbuhan ekonomi (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak (Y). Pengaruh positif tersebut artinya jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sebesar -12.40768%.

5.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas (belanja dibidang kesehatan, bidang pendidikan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi) mampu menjelaskan variabel terikat (indeks pembangunan manusia). Diketahui nilai R^2 yaitu sebesar 0.830651. Hal tersebut berarti bahwa sebesar 83% variabel bebas (belanja kesehatan, bidang pendidikan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel terikat (indeks pembangunan manusia). Sedangkan sisanya 17% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

5.2.3 Uji T (Uji Parsial)

Uji T merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara parsial. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individu (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat, dengan ketentuan apabila prob. variabel bebas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan apabila prob. variabel bebas $> 0,05$ maka H_0 diterima. Berikut penjelasan mengenai Uji T.

1. Pengujian Pengaruh Belanja Kesehatan (X_1) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil estimasi, maka diketahui nilai prob. belanja kesehatan sebesar $0,4059 > 0,05$ maka H_0 diterima. Hal tersebut berarti secara parsial belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak.

2. Pengujian Pengaruh Belanja Pendidikan (X_2) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil estimasi, maka diketahui nilai prob. belanja pendidikan sebesar $0,6391 > 0,05$ maka H_0 diterima. Hal tersebut berarti secara parsial belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak.

3. Pengujian Pengaruh Tingkat Kemiskinan (X_3) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil estimasi, maka diketahui nilai prob. kemiskinan sebesar $0,6162 > 0,05$ maka H_0 diterima. Hal tersebut berarti secara parsial kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak.

4. Pengujian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_4) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Berdasarkan hasil estimasi, maka diketahui nilai prob. Pertumbuhan ekonomi sebesar $0,0014 < 0,05$ maka h_0 ditolak atau h_a diterima. Hal tersebut berarti secara parsial pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak.

5.2.4 Uji F

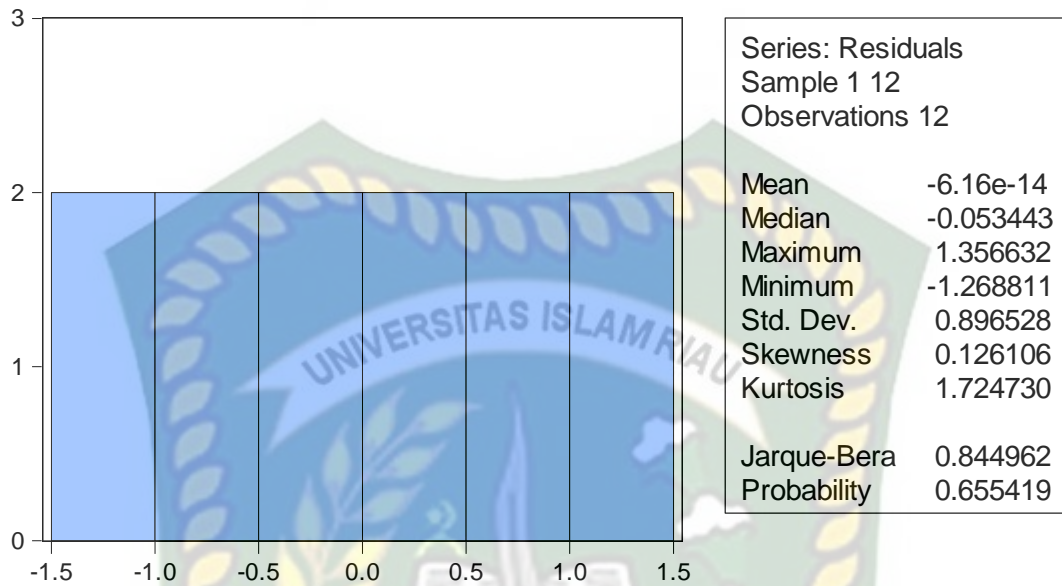
Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak. Ketentuan dalam pengujiannya ialah jika $f \text{ prob.} < 0,05$ maka h_0 ditolak jika $f \text{ prob.} > 0,05$ h_0 diterima.

Dari hasil estimasi, diketahui bahwa nilai $f \text{ prob.}$ Sebesar $0.007809 < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel belanja kesehatan, belanja pendidikan, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak.

5.2.5 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya penyimpangan atas asumsi klasik. Berikut akan dijelaskan hasil analisa pada uji asumsi klasik.

1. Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olahan Eviews 10

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak bisa dilihat dari bentuk histogram residual yang pada umumnya berbentuk lonceng jika mempunyai distribusi normal dan juga melakukan Uji Jarque-Bera.

Dari hasil estimasi regresi, bisa dilihat bahwa grafik histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka kedua variabel tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan uji Jarque-Bera diketahui bahwa nilai JB ialah 0,844962 dan nilai *Chi Square* ialah 14,0671. Nilai JB lebih kecil dari nilai *Chi Square* yang berarti model regresi tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 08/17/20 Time: 22:29
Sample: 1 12
Included observations: 12

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3885.938	36919.41	NA
LX1	4.538612	27519.38	7.658369
LX2	16.02940	108621.8	9.911154
X3	0.675259	213.6453	1.840757
LX4	5.931611	17568.40	2.224355

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linier antara variabel independent. Adanya hubungan antara variabel dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF dengan ketentuan jika nilai VIF < 10 maka tidak terkena multikolinieritas.

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diketahui nilai VIF dari variabel independent yaitu nilai VIF LX₁ ialah 7.658369, nilai VIF LX₂ ialah 9.911154, nilai VIF X₃ ialah 1.840757 dan nilai LX₄ ialah 2.224355. Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari keempat variabel independen tersebut kecil dari 10 yang artinya keempat variabel tidak terkena multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.078462	Prob. F(4,7)	0.1873
Obs*R-squared	6.514769	Prob. Chi-Square(4)	0.1639
Scaled explained SS	0.803302	Prob. Chi-Square(4)	0.9380

Sumber: Hasil Olahan Eviews 10

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai *chi square* dengan ketentuan jika nilai *chi square* ($\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$) dan nilai kritis *chi square* dengan ketentuan jika nilai *chi square* lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai *chi square* lebih besar dari nilai kritis maka terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil dari pengolahan data, maka diketahui bahwa nilai *chi square* ($\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$) ialah sebesar 0.1639. Sedangkan nilai kritis *chi square* ialah sebesar 14.0671. Dapat dilihat bahwa nilai *chi square* lebih kecil dari nilai kritis yang artinya model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokolerasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi linier ada kolerasi antara satu variabel gangguan dengan variabel lainnya. Jika terjadi kolerasi maka dinamakan ada masalah autokolerasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi ini dapat dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson. Metode pengujian sebagai berikut:

- a) Jika $DW < dL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokolerasi positif
- b) Jika $DW > 4-dL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokolerasi negatif.
- c) Jika $dU < DW < 4-dU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokolerasi positif atau negatif.

- d) Jika DW terletak diantara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (ragu-ragu)

DW tabel: = 5%, $k = 5$, $N = 12$. Maka :

$$dL = 0,3796 \qquad 4-dL = 3,6204$$

$$dU = 2,5061 \qquad 4-dU = 1,4939$$

$$DW \text{ statistik} = 1.239935$$

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa data pengamatan terdapat gejala autokolerasi karena nilai DW statistik $1.239935 > dL 0,3796$.

5.3 Pembahasan

1. Pengaruh Belanja Daerah di Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak.

Dari hasil penelitian diatas, secara parsial variabel belanja kesehatan diketahui memiliki nilai T prob sebesar $0,4059 > 0,05$ maka H_0 diterima, maka variabel belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018. Kemudian diketahui koefisien regresi belanja kesehatan sebesar 1.883778 yang artinya jika belanja kesehatan naik sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sebesar 1.88%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil regresi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Muliza, T. Zulham, Chenny Seftarita (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh” dalam

penelitian ini mengemukakan bahwa variabel belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Peneliti berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan kurang mampu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Karena kecilnya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Kabupaten Siak. Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk bidang kesehatan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan sedikitnya pengeluaran pemerintah di Kabupaten Siak. Seharusnya dinas kesehatan turun tangan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan peralatan kesehatan supaya indeks pembangunan meningkat lebih baik dan melihat pertumbuhan peningkatan indeks pembangunan manusia lebih besar.

2. Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak.

Dari hasil penelitian diatas, secara parsial variabel belanja pendidikan diketahui memiliki nilai $T \text{ prob sebesar } 0,6391 > 0,05$ maka H_0 diterima, maka variabel belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018. Kemudian diketahui koefisien regresi belanja pendidikan sebesar 1.962166, yang artinya jika belanja pendidikan naik sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sebesar 1.96%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil regresi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Muliza, T. Zulham, Chenny Seftarita (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Produk Domestik Regional Bruto. Terhadap

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh” dalam penelitian ini mengemukakan bahwa variabel belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Peneliti berpendapat bahwa alokasi APBD untuk bidang pendidikan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. APBD Kabupaten Siak dari kurun waktu 2007 hingga 2018 mengalami fluktuasi baik dari besaran ataupun persentasenya terhadap total APBD. Anggaran untuk pendidikan masih kurang dari 20%. Alokasi dana masih belum dapat sepenuhnya dirasakan secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Siak.

Dari hasil penelitian diatas, secara parsial variabel tingkat kemiskinan diketahui memiliki nilai T prob sebesar $0,6162 > 0,05$ maka H_0 diterima, maka variabel tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018. Kemudian diketahui koefisien regresi tingkat kemiskinan sebesar 0.430962, yang artinya jika tingkat kemiskinan naik sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan naik sebesar 0.43%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil regresi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Muliza, T. Zulham, Chenny Seftarita (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto. Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di

Provinsi Aceh” dalam penelitian ini mengemukakan bahwa variabel tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Peneliti berpendapat bahwa presentase penduduk miskin tergolong rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari segi indeks pembangunan manusia (IPM) terus meningkat. Pernyataan ini pernah disampaikan oleh Fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Siak, yang di muat dalam berita antara riau pada tanggal 23, April 2018, yang menyatakan bahwa secara umum selama tiga terakhir angka kemiskinan di Kabupaten Siak dibawah angka kemiskinan nasional dan Provinsi Riau. Namun pada tahun 2016-2017 dari 5,52 persen menjadi 5,8 persen, “kata juru bicara fraksi Golkar, Miduk Gunug dalam siding paripurna penyampaian tanggapan fraksi DPRD Siak atas LKPI Bupati Siak”. Fraksi Golkar sudah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, serta peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan. Dan sudah melaksanakan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan, namun angka kemiskinan masih saja meningkat. Menurut Fraksi Golkar, keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dan pelaksanaan program-program yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan Pusat Data Informasi (Pusdatin) penduduk miskin di Kabupaten Siak berjumlah 17.300 kepala keluarga (KK) pada tahun 2011, dan mengalami kenaikan menjadi 87.063 jiwa atau 22.051 pada tahun 2015. Dan masih mengalami kenaikan sebesar 0,3 persen pada 2017 lalu Berdasarkan data yang masuk adalah laporan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak berdasarkan penilaian dan data musyawarah kampung. Jumlah jiwa

penduduk miskin akan bertambah dengan data yang baru masuk, angka kemiskinan tersebut selain memang masyarakatnya yang miskin, ada juga pemecahan KK dan warga yang pindahan dari daerah lain ke Siak.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak.

Dari hasil penelitian di atas, secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi di ketahui memiliki nilai T prob sebesar $0,0014 < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti secara parsial pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018. Kemudian diketahui koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar -12.40768 yang artinya jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka indeks pembangunan akan naik sebesar -12.40%.

Sesuai dengan Arsyad, (2010:96) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh penambahan faktor produksi tanpa adanya perubahan teknologi produksi yang lama. Dengan adanya kenaikan output akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Novita dewi, 2017 yang berjudul “Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau” hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap indeks

pembangunan manusia, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Belanja Bidang Kesehatan (X_1) diketahui memiliki nilai T prob sebesar 0,4059 $>$ 0,05 maka H_0 diterima, maka variabel belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018. Belanja Bidang Pendidikan (X_2) diketahui memiliki nilai T prob sebesar 0,6391 $>$ 0,05 maka H_0 diterima, maka variabel belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018.
2. Tingkat Kemiskinan (X_3) diketahui memiliki nilai T prob sebesar 0,6162 $>$ 0,05 maka H_0 diterima, maka variabel tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018.
3. Pertumbuhan Ekonomi (X_4) diketahui memiliki nilai T prob sebesar 0,0014 $<$ 0,05 maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti secara parsial pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Siak tahun 2007-2018.

6.2 Saran

Dari kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait,

1. Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia untuk diteliti agar penelitian lebih akurat.
2. Untuk pemerintah diharapkan untuk memperhatikan dan meningkatkan alokasi untuk belanja tepat guna dan tepat sasaran khususnya untuk belanja kesehatan dan belanja pendidikan maupun infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik sehingga memberikan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Siak.
3. Untuk pemerintah diharapkan agar membuat strategi pembangunan terutama masyarakat miskin agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dengan penyempurnaan sistem sosial dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Iswan. 2013. *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Universitas Brawijaya.
- Boediono. 1981. *Pengantar Ilmu Ekonomi* No 4. Yogyakarta. BPFE.
- Budiono, Sidik. 2009. *Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Penekanan Pada Investasi Pendidikan*. JSE Volume IV. No 2. Hal 123-140.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia*. Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Indeks pembangunan manusia*. Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Siak Dalam Angka*. Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia. (Metode Baru)*. Kabupaten Siak.
- Laporan Kinerja Kabupaten Siak. 2017.
- Lubis. 2015. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Meliyana Astri, Sri, harya. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia*. [Jurnal]. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith. 2002. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedua. Jakarta. Erlangga.
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith. 2008. *Pembangunan Manusia. Edisi Kesembilan*. Jakarta.
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith. 2010. Edisi Kesebelas. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta.
- Muliza, T. Zulham, Chenny Seftarita. 2014. *Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

Novita Dewi. 2017. *Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau*. [Jurnal]. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Riau.

Peraturan Kementrian Keuangan No. 84 Tahun 2009. Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rino Karno Sihombing. 2017. *Pengaruh Belanja Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Produktivitas Tenaga Kerja*. Volume 6. No 1.

Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Susye Marlen Ketsy Lengkong, Debby Ch. Rotinsulu, Een N. Walewangko. 2015. *Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung*. Ekonomi Pembangunan. Univesitas Sam Ratulangi.

UNDP. 2016. *Human Development Report 2016*. United Nations Development Programme. New York. USA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar No. 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.